

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Fuady

Jurusan Pembangunan Sosial, fuadyza45@gmail.com, Universitas Iskandar Muda

ABSTRACT

The development of world progress in facing various challenges and various problems has an impact on the welfare of the people, especially in the economy, social and culture in facing the challenges of globalization, especially in the advancement of science and technology. Various social problems can occur such as crime, inter-racial conflict, poverty, divorce, prostitution, delinquency of children, adolescents, and parents, drug abuse, suicide, and mental illness. In the Aceh region, not only because of globalization, technological advances, conflict and the tsunami have brought this region to face various social problems. The problem of poverty is still a burden in society. According to BPS data, "The percentage of the poor (who are below the poverty line) in Aceh in March 2022 was 14.64 percent, decreasing in 2021 to 16.53 percent in September. Iskandarmuda University in particular the Faculty of Social and Political Sciences concentrates on community empowerment and social policy plays a major role in developing human resources, developing science, and social development policies through research activities, and developing community empowerment with community service towards a prosperous society, independent and dignified. The role of the social studies study program by producing research and collaboration in the implementation of handling social problems and poverty has given positive results. Sosiatri alumni have worked in various government and private institutions such as universities, social services, district/city government offices, and the National Family Planning Office (BKKBN), members of the TNI/Polri as well as in various other public and private institutions. Some of the Sosiatri alumni have held political positions such as Regents, DPRD members, echelon II and III officials in several regions in Indonesia.

Keywords: Social Development, Higher Education, Social Development Study Program, Alumni

Abstrak

Perkembangan kemajuan dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai permasalahan berimbas pada kesejahteraan rakyat terutama dalam ekonomi, sosial dan budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai masalah sosial bisa saja terjadi seperti kejahatan, konflik antar Ras, kemiskinan, perceraian, pelacuran, *delinkwensi* (kenakalan) anak-anak, remaja, dan orang tua, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, dan sakit jiwa. Di daerah Aceh tidak hanya karena globalisasi, kemajuan teknologi, konflik dan tsunami telah membawa daerah ini menghadapi berbagai masalah sosial. Masalah kemiskinan masih tetap menjadi beban dalam masyarakat. Menurut data BPS "Persentase penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan) di Aceh pada Maret 2022 sebesar 14,64 persen, menurun ditahun 2021 pada bulan September 16,53 persen. Universitas Iskandarmuda khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan sosial memegang peranan utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta kebijakan pembangunan sosial melalui aktifitas penelitian, dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan pengabdian pada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Peran prodi sosiatri dengan menghasilkan penelitian dan kerjasama dalam implementasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan telah memberi hasil positif. Alumni Sosiatri telah bekerja di berbagai instansi Pemerintah dan swasta seperti di Perguruan Tinggi, Dinas Sosial, Kantor Pemerintahan Kabupaten/kota, dan Kantor Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), anggota TNI/Polri serta di berbagai lembaga negeri dan swasta lainnya. Beberapa di antara alumni Sosiatri ada yang menduduki jabatan politis seperti Bupati, anggota DPRD, pejabat eselon II dan III beberapa daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Pembangunan Sosial, Perguruan tinggi, Prodi Pembangunan Sosial, Alumni

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai permasalahan berimbas pada kejahteraan rakyat terutama dalam ekonomi, sosial dan budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai akibat dari globalisasi tersebut membuat antara negara yang satu dengan negara lain seakan tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi. Pembangunan suatu upaya untuk menciptakan perubahan menuju keadaan dan situasi yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Tertinggal menjadi maju, tradisional menjadi modern, bodoh menjadi pandai, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Pembangunan pada suatu negara banyak dipengaruhi di pengaruhi oleh negara maju yang dibidang Iptek dan ekonomi terhadap negara berkembang . Kemajuan teknologi industri, teknologi komunikasi dan informasi sangat berpengaruh pada pada tatanan sosial budaya pada kehidupan suatu negara. Penengaruh globalisasi yang menjurus pada modernisasi sangat berdampak pada masyarakat pada kurang mapu (miskin).

Berbagai masalah sosial bisa saja terjadi seperti kejahatan, konflik antar Ras, kemiskinan, perceraian, pelacuran, delinkwensi (kenakalan) anak-anak, remaja, dan orang tua, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, dan sakit jiwa. Fenomena gelandangan dan pengemis di musim-musim bulan tertentu dan jelang lebaran juga tidak asing lagi terjadi di kota-kota besar.

Di daerah Aceh tidak hanya karena globalisasi, kemajuan teknologi, konflik dan tsunami telah membawa daerah ini menghadapi berbagai masalah sosial. Masalah kemiskinan masih tetap menjadi beban dalam masyarakat. Menurut data BPS “Persentase penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan) di Aceh pada Maret 2022 sebesar 14,64 persen, menurun ditahun 2021 pada bulan September 16,53 persen, yaitu sebesar 0,89 persen. BPS Propinsi Aceh.[6] Kemudian masalah anak kecil berjualan di lampu merah, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan badut – badut boneka, permasalahan ini bersifat musiman, namun peningkatan jumlah badut-badut boneka dan gepeng di pusat-pusat ibu kota juga dirasakan dan meresakan masyarakat. Persoalan kemiskinan dapat dikatakan merupakan sumber yang bermuara pada masalah kesejahteraan sosial yang harus dihadapi oleh bangsa ini.

Masalah sosial adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh semua orang, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat. Masalah sosial merupakan kondisi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, dan mempengaruhi bagi sejumlah warga masyarakat. Kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan dalam masyarakat yang merusak keharmonisan sosial perlu diawasi dengan suatu usaha bersama setiap elemen masyarakat dan pemerintah. Untuk pemecahan berbagai masalah sosial ini memerlukan dukungan semua pihak agar secara perlahan-lahan dapat ditanggulangi.

Mengantisipasi berbagai permasalahan itu, maka setiap aktifis sosial memiliki kesempatan dan wewenang untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya menekankan pada ekonomi semata. Namun segala aspek yang akan mendukung untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kuat harus selalu dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Tingkat pemahaman masyarakat tentang pembangunan semakin meningkat, supaya cita - cita kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek dapat diupayakan oleh masyarakat sendiri, dan juga dengan proses pengembangan masyarakat kekuatan luar yang tidak sehat tidak mempunyai celah untuk mencoba mengusik kesejahteraan masyarakat.[1]

Secara spesifik ada masalah besar saat ini yang harus disikapi oleh perguruan tinggi memberikan kontribusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya, yaitu : Bagaimana mengembangkan kesiapan sumber daya manusia mengantisipasi masalah sosial menjadi masyarakat mandiri dan kuat menghadapi tuntutan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan seringkali diartikan pertumbuhan yang bermakna material, dan senantiasa dihubungkan dengan ekonomi atau pertumbuhan (*growth oriented*). Namun sebenarnya pembangunan harus memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh semua sehingga tidak merugikan orang atau pihak lain, karena berhasil membangun harkat martabat manusia. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata mengabaikan hakekat manusia yang direduksi menjadi obyek atau materi, bukan menjadi subyek dari pembangunan. Seharusnya manusia sebagai orientasi pembangunan, sehingga dinamakan pembangunan yang berorientasi pada manusia.[6] Manusia diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang bersifat sosial dengan tujuan

utama adalah *Human Development*. Hal ini merupakan paradigma pembangunan yang disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centred development*),

Ciri pembangunan yang berpusat pada manusia adalah manusia sebagai tujuan akhir dari aktivitas pembangunan dan bukan hanya sebagai alat. Sehingga apapun yang dihasilkan dari pembangunan yang bersifat fisik, harus menghasilkan pembangunan manusia (*human development*), yang dicapai melalui alat ukur, salah satunya yaitu *Human Development Index* yang mengukur lama hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Terdiri dari : angka harapan hidup, angka melek huruf, daya beli, rata-rata lama bersekolah, pemerataan pendapatan dan ketimpangan jender.[7]

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu; 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Dari batasan tersebut, maka kesejahteraan sosial dapat dicermati sebagai “kondisi” dan sebagai “sistem, kebijakan, dan program”. Kesejahteraan sosial sebagai “kondisi”, terletak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan dipengaruhi oleh kondisi sik, pendidikan, keterampilan, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat.[2]

Pembangunan Sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang berhubungan dengan proses dinamis dalam pembangunan ekonomi.[6] Sedangkan tujuan pembangunan sosial budaya menurut batasan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai antara lain meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa pembangunan sosial merupakan suatu kegiatan yang membawa perubahan pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan Sosial, mengemukakan pembangunan kesejahyeraan sosial yang dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : (1) Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; (2) Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara; (3) Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalian dan pendayagunaan potensi dirinya; dan (4) Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. [3]

Terkait dengan hal itu antara lain ada tiga tantangan pokok yang sangat mendesak dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama di Aceh. Tantangan *pertama*, adalah dampak covid 19, tangatangan globalisasi, dan budaya . Tantangan *kedua* industrialisasi yang mempunyai akibat yang luas terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak perdagangan bebas yang akan membawa efek akan mudah hilang kemandirian masyarakat yang terlalu bergantung pada kekuatan asing. Tantangan *ketiga*, yang juga memprihatinkan pada saat ini kegagalan pembangunan (*Distorted Development*) banyak didominasi oleh kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia tidak merata. Itu artinya adanya masyarakat yang lemah dan yang kuat tidak berjalan seimbang antara yang di kota dan di desa terjadinya ketimpangan. Kita bisa melihat banyak sekali saat ini pengusaha-pengusaha besar baik dari kalangan sendiri ataupun asing yang beruntung memanfaatkan kelemahan masyarakat yang lemah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ketiga tantangan tersebut merupakan kegagalan pembangunan terhadap negara-negara berkembang ternyata tidak saja oleh faktor-faktor kendali, seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang otoriter, perang dan perpecahan, namun juga oleh kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Masalah kesejahteraan sosial dapat muncul di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Peningkatan masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun baik jenis dan kualitasnya juga semakin

kompleks, sehingga di dalam penanganannya harus dilakukan secara terkoordinasi walaupun pada tingkat desa atau kelurahan sekalipun.[2]

Pembangunan ekonominya tidak disertai dengan suatu tingkat yang memadai dari pembangunan bidang sosial. Kegagalan untuk mengharmonikan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dan juga menjamin bahwa keuntungan dari kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.[6] Kegagalan yang terjadi adalah kegagalan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan obyektivitas pembangunan bidang sosial. Misalnya: pendapatan perkapita tinggi tetapi masih banyak yang pengangguran, pembangunan perumahan yang masif tapi perkampungan kumuh masih banyak, dan lainnya. Selain itu, pengalaman dan kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang, selain karena pendekatan yang keliru yaitu terlalu terpusat pada penekanan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas. Dalam proses pembuatan keputusan rakyat banyak tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan. Mengatasi permasalahan pembangunan yang terdistorsi ini (*distorted development*) memang dibutuhkan perspektif baru dalam upaya pembangunan, perspektif baru tersebut adalah "Perspektif Pembangunan Sosial".[8]

Kesejahteraan sosial diterjemahkan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesesuaian, dan ketentraman lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan rakyat Indonesia menjelaskan bahwa, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejalan dengan itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 58/HUK/2008 menegaskan bahwa Kesejahteraan Sosial memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Maksud dari pengertian dan ketentuan di atas jelas bahwa Negara berkewajiban memberikan hak pada setiap warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak sejahtera lahir dan bathin.

Sedangkan masalah kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah tidak layak huni.

Pada tingkat yang paling dasar, mengacu pada ADB (1990) dan UNDP (2003), kesejahteraan manusia yang beradab adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu : Kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.[8] Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia. Faktanya perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraannya. Di sinilah peran pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi mengembangkan suasana yang kondusif bagi upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara beradab dan berkeadilan (bermartabat).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, sedangkan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelesan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. [4]

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[4]

Pendekatan penelitian kualitatif yang penulis lakukan untuk mendeskripsikan tentang peran perguruan tinggi dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial dalam berbagai permasalahan masalah di tengah

masyarakat Aceh khususnya. Dengan menggunakan metode ini untuk menjawab permasalahan dan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diletisi sehingga dapat diambil kesimpulan bagai mana peran perguruan tinggi untuk kepedulian terhadap permasalahan dan tantang dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar kemajuan bangsa, tempat mempersiapkan sumber daya manusia pelaksana pembangunan terutama pembangunan bidang kesejahteraan sosial, sudah semestinya merespon secara tepat sesuai tridharma yang diembannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang kurikulum perguruan tinggi yang berbasis pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial, diimplementasikan melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Peran perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mendorong, membimbing dan membantu pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan yang dilakukan secara partnership dengan unsur pemerintah, LSM, pihak swasta dan stakeholders lainnya.[5]

Perumusan kurikulum kearah ini harus dilandasi pada pemikiran bahwa untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat dibutuhkan upaya peningkatan kapital manusia (human capital) dan kapital sosial (social capital) dalam bentuk pemberdayaan yang menjadi dasar bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Di samping itu untuk mengembangkan kapital manusia dan kapital sosial selain melalui investasi sosial, dibutuhkan pula lingkungan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang kondusif, seperti penegakan hak azasi manusia (human right), kepastian hukum (social justice), serta menghargai martabat manusia (human dignity). Hal ini menjadi pemacu dan keharusan untuk terwujudnya kesejahteraan sosial.

Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai kerangka penguatan peranan perguruan tinggi dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah:

a. Pengembangan Kegiatan yang berbasis Pembangunan

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Peng-sosialisasi-an perencanaan pembangunan partisipatif melalui lokakarya, seminar, pelatihan, dan tulisan ilmiah di media kampus maupun daerah.

b. Mata Kuliah Pembangunan

Agar perguruan tinggi mampu mengambil peranan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, maka penyiapan sumberdaya manusia yang benar-benar mampu membantu masyarakat mencapai harapannya dan menjadi mitra pembangunan di daerah, maka materi bahan ajar atau mata kuliah menjadi salah satu materi perkuliahan antar disiplin ilmu pengetahuan di perguruan tinggi

c. Materi pembekalan KKN

Pendekatan wilayah dalam pengembangan pembangunan daerah secara berkesinambungan memerlukan pula pemahaman atas aspek-aspek spesifik.

d. Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, metode, program, kelembagaan dan gerakan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama, mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi masalah secara bersama, dan mengaktifkan kelembagaan atau menyediakan fasilitas untuk alih teknologi kepada masyarakat.[5]

Universitas Iskandarmuda salah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan mengembangkan kajian pembangunan sosial dan kesejahteraan yang berbentuk kurikulum yang berkontribusi langsung pada proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Universitas Iskandar Muda memiliki salah satu program studi Pembangunan Sosial sala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkonsentrasi langsung pada pemberdayan masyarakat dan kebijakan sosial yang sangat berperan pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti: (1) mengembangkan sumber daya manusia dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan, serta konsep alternatif kebijakan pembangunan sosial melalui aktifitas penelitian, (3) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat (berkeadilan dan berperadaban) dan (4) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian dosen dan penelitian mahasiswa. Ini

merupakan kontribusi langsung yang merukakan pemberdayaan masyarakat walaupun tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat. Kontribusi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi akan berdampak jangka panjang.

2. Peran Prodi Pemangunan Sosial

Program Prodi Pembangunan Sosial Fisipol Unida merupakan salah satu prodi swasta yang Aceh di yang berdiri semenjak tahun 80-an yang kontribusi dan didorong untuk upaya menanggulangi permasalahan sosial kemasyarakatan dan kesenjangan sosial sebagai dampak dari berkembangnya pembangunan kawasan-kawasan industri besar di Daerah Istimewa Aceh yang ada pada tahun 1980/1981. Aceh mengalami permasalahan diantaranya komplik berkempanjangan, krisis ekonomi, terjadinya urbanisasi dan permukiman baru, covid 19 sehingga sangat berdampak pada kemiskinan yang merusak pada perekonomian masyarakat desa. Kehadiran Jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dapat melakukan dan mempelajari permasalahan sosial pada masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Tantangan ini merupakan ujian nyata kontribusi prodi pembangunan sosial Universitas Iskandar Muda untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.

Program studi pembangunan sosial memainkan peran penting dalam derap langkah pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pembangunan masyarakat dengan memperkuat dan melahirkan sumber daya manusia (SDM) bidang pembangunan sosial. Berbagai hasil penelitian dan berkerjasama dalam implementasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan telah memberi hasil positif.

Program Studi Pembangunan Sosial melahirkan sejumlah alumni Pemangunan Sosial telah bekerja di berbagai instansi Pemerintah dan swasta seperti di Dinas sosial, Perguruan Tinggi, Kantor Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kantor Pemerintahan Kabupaten/kota, dan anggota TNI/Polri serta di berbagai lembaga negeri dan swasta lainnya. Sebahagian alumni Prodi Pembangunan Sosial menduduki jabatan politis seperti Bupati, anggota DPRD, pejabat eselon II dan III di seluruh Indonesia dengan jumlah alumni lebih dari 800 orang.

Selain itu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama-sama dengan mahasiswa telah menjadi tugas di Program Studi Pembangunan Sosial. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan pengajaran serta dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun seminar. Kegiatan pengabdian pada masyarakat, kerjasama terjalin antara lain dengan beberapa instansi di antaranya dengan Lembaga Suadaya Masyarakat *Woman Development Center* (WDC) Kota Banda Aceh, Pemko Banda Aceh, dan Pemda Aceh Jaya. Dalam kerjasamainstansi terkait perlu ditingkatkan dan perlu kerjasama dengan lembaga yang lain.

Program studi Pembangunan Sosial memperoleh peringkat Akreditasi B, dengan keputusan BAN-PT Nomor : 1811/sk/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2021 tanggal 08 Februari 2021. Pada awalnya Ilmu Pemangunan Sosial dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan sosial untuk merespon kondisi problematik yang cukup kompleks pasca kemerdekaan seperti : tingkat harapan hidup yang rendah, pengangguran, gelandangan, pendapatan yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Pada periode tersebut konsentrasi kajian Prodi Pemangunan Sosial melakukan kajian berbagai hal diantaranya penyakit masyarakat seperti pengemis dan pengangguran yang berdampak pada pencurian dan pembunuhan. Pengembangan kajian tentang bagaimana melakukan pengembangan masyarakat dengan dilakukan kebijakan pada tantangan pemerintah propinsi, daerah maupun tingkat yang paling rendah tingkat desa. Dengan diakukan konsentrasi kajian Ilmu Pemangunan Sosial pada saat ini adalah Pembangunan Masyarakat dan Kebijakan Sosial, dan pendekatan semula individual bergeser ke *community*. Kedua konsentrasi tersebut merepresentasikan kajian mengenai upaya yang dilakukan secara integral untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang akan bermuara pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

3. Lulusan Prodi Pemangunan Sosial

Program Studi Pembangunan Sosial merupakan studi yang mempelajari mengenai pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Prodi Pembangunan Sosial menggagas strategi pemecahan masalah yang efektif karena tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun juga pada strategi pasca penanganan masalah. Pendekatan pembangunan yang digunakan : Pembangunan Masyarakat dan Pengorganisasian Masyarakat untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial.

Prodi Pembangunan Sosial dapat meluluskan : 1. Mampu menjadi ahli pembangunan masyarakat untuk institusi pemerintah, Lembaga sosial masyarakat (LSM) dan pada perusahaan. Mampu melakukan analisis kebijakan-kebijakan sosial untuk pemerintah dan lembaga legislatif. 2. Mampu menjadi peneliti sosial (social researcher), dan 3. Mampu menjadi akademisi.

Kompetensi lulusan Program studi Pembangunan Sosial dalam proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan sebagai lulusan yang siap sebagai fasilitator program-program pemberdayaan masyarakat, dan sebagai lulusan tenaga ahli dalam merumuskan kebijakan sosial berdasarkan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut itu perlu dikemukakan beberapa hal pokok yang terkait dengan kontribusi lulusan perguruan tinggi ini yang relevansi kurikulumnya dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial antara lain :

Sebagai Fasilitator Program-program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a. Menjadi fasilitator dalam pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan wanita rawan sosial masyarakat (TKSM).
- b. Menjadi fasilitator dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemitraan (karang taruna, organisasi sosial, LSM, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), selain itu juga menjadi fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Sebagai Tenaga Ahli dalam Merumuskan Kebijakan Sosial adalah :

- a. Membuat kebijakan tentang mekanisme bantuan sosial.
- b. Membuat kebijakan tentang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Membuat kebijakan tentang pengelolaan dana sosial dari pemerintah, masyarakat, dan swasta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan adalah merupakan pilar kemajuan bangsa tempat mempersiapkan sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah yaitu kebutuhan sumber daya manusia dalam pembangunan, terutama perguruan tinggi yang terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Program Studi Pembangunan Sosial salah satu prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unida dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan sosial memegang peranan utama dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial : (1) mengembangkan sumber daya manusia dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan, serta konsep alternatif kebijakan pembangunan sosial melalui aktifitas penelitian, dan (3) mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat (berkeadilan dan berperadaban).

Program studi ini telah memberikan kontribusi dan memainkan peran penting dalam derap langkah pembangunan daerah, telah memperkuat sumber daya manusia bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan. Berbagai hasil penelitian dan kerjasama, meskipun kerjasama dengan instansi terkait belum cukup maksimal, namun dalam implementasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan telah memberi hasil positif. Sejumlah alumni telah bekerja di berbagai instansi negeri dan swasta di daerah ini. Selain kontribusi segi lulusan, dalam percepatan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kontribusi dengan pengkajian program Pemberdayaan Masyarakat, dan program Perumusan Kebijakan Sosial.:

Oleh karena itu perlu konsistensi peningkatan sinergi instansi terkait dengan perguruan tinggi dalam hal kerjasama terutama perguruan tinggi yang membidangi kajian pembangunan sosial dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syarifuddin, "Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Proses Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial," *J. Sosiol. USK (Media Pemikir. Apl.*, vol. 9, no. 1, pp. 86–100, 2016.
- [2] A. Suhendi, "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *Sosio Inf.*, vol. 18, no. 2, pp. 105–116, 2013, doi: 10.33007/inf.v18i2.73.
- [3] S. Kasus *et al.*, "Kontribusi organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial," pp. 85–99.
- [4] prof. dr. sugiyono, "prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf," *Bandung Alf.* p. 143, 2011.
- [5] S. E. Kornita, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif," *J. Sos. Ekon. Pembang.*, vol. 3, no. 8, pp. 179–188, 2013, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/9175/peran-perguruan-tinggi-dalam-pengembangan-perencanaan-pembangunan-partisipatif>

- [6] Midgley, (2005), *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Diperta Islam Dapag RI, Jaakarta
- [7] _____, BPS Propinsi aceh <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html> diakses 19-09-2022).
- [8] Sumardjo, (2010), *Pemberdayaan Masyarakat dan Pngelolaan Konflik dalam Rangka Pengelolaan Kebun Sawit Berkelanjutan*. Kerjasama Care IPB dengan Badan Litbang Pembangunan Daerah. Pekanbaru.
- [9] Rohman, Arif (2014), *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, <http://sosbud.kompasiana.com/2014/11/24/pembangunan-kesejahteraan-sosial-di-indonesia-hambatan-tantangan-dan-peluang-705615.html>, diakses 29 Nov 2014